



PENYERAHAN LKPD TAHUN ANGGARAN 2013:

"Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Pemda Se-DIY siap dinilai BPK"

Yogyakarta (Selasa, 25 Maret 2013) – Hari ini Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten se-wilayah Yogyakarta secara serentak menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 (TA 2013) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DIY (BPK DIY). *"Penyerahan LKPD TA 2013 ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa LKPD disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir."* demikian Kepala Perwakilan, **Sunarto** mengawali sambutannya.

"Saya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menyerahkan LKPD TA 2013 tepat waktu sesuai amanat Undang-Undang", ucap Sunarto melanjutkan sambutannya. Selain sebagai upaya pelaksanaan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004, acara ini juga merupakan bentuk ikrar bahwa laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah siap dinilai (diperiksa) oleh BPK. *"BPK DIY akan segera memeriksa LKPD tersebut, sehingga diharapkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD dapat disampaikan kepada DPRD 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah ini."* demikian harapan Sunarto merujuk pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara .

Penyerahan LKPD TA 2013 yang dilaksanakan di Auditorium BPK DIY ini dihadiri oleh Gubernur, Walikota, serta Para Bupati di wilayah Yogyakarta beserta perangkatnya. Bupati Kulonprogo, **Hasto Wardoyo** dalam sambutannya sebagai wakil Pemerintah Daerah berharap agar kinerja pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten TA 2013 lebih baik dari tahun sebelumnya. *"Jika pada tahun anggaran 2012 baru empat pemerintah daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), semoga untuk TA 2013 semuanya bisa WTP."* demikian harapnya.

Pemeriksaan akan dilakukan BPK DIY dengan menjunjung tinggi nilai independensi, integritas, serta profesionalisme pemeriksa. Sinergi seluruh elemen (entitas yang diperiksa, *stakeholder*, serta masyarakat) akan mendukung tercapainya pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga pembangunan di wilayah Yogyakarta akan semakin maju dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.